



## Upaya Meningkatkan Usaha Kreatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Sri Pujiningsih<sup>1,a</sup> ; Sri Puji Astuti<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

<sup>b</sup> Fakultas Teknik, Universitas Pekalongan

**Abstrac.** *This paper is a contribution of thought in order to observe today's phenomena that highlight many creative efforts as a pillar of the creative economy. Pekalongan's economy has been based on creative industries, it does not mean to let everything go just a habit. The world economy is racing so fast, if it does not follow its rhythm it will be overtaken by time and wil end to the lives of people who are not prosperous. This program is based on the culture of the people. Referring to existing government policies, Pekalongan city is proactive towards creative efforts in its region including by issuing Peraturan Walikota that support and regulate creative business programs and empower communities through PKK and Kelompok Dasa Wism. This papar is a discourse for a more- in depth research in the future. The method used is discourse analysis in case the priority of critical observation and appropriate literature.*

**Keywords:** *Creative efforts, empower communities, policy of local government*

**Abstrak.** Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka mengamati fenomena dewasa ini yang banyak menyorot usaha kreatif sebagai pilar ekonomi kreatif. Kota Pekalongan yang selama ini roda perekonomiannya banyak bertumpu pada industri-industri kreatif, bukan berarti dalam keterlenaan membiarkan semuanya berlangsung apa adanya sebagai sebuah kebiasaan. Perekonomian dunia berpacu begitu cepat, apabila tidak mengikuti iramannya maka akan terlibas oleh waktu, dan akan berujung pada kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah ada, Kota Pekalongan bersikap pro-aktif terhadap geliat usaha-usaha kreatif di wilayahnya, diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Walikota yang mendukung dan mengatur program usaha kreatif dan memberdayakan masyarakat melalui PKK dan Kelompok Dasa Wisma. Program ini bertumpu pada budaya lokal masyarkat yang sudah mengakar. Tulisan ini merupakan wacana untuk penelitian yang lebih mendalam di masa depan. Metode yang digunakan adalah analisis wacana, dalam hal prioritas pada observasi kritis dan literatur yang sesuai.

**Kata Kunci:** usaha kreatif, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> **Korespondensi:** spningsih.unikal@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah daerah Kota Pekalongan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, memiliki visi RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021, yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan No.25 Tahun 2017 yaitu “terwujudnya kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya”. Perjalanan menuju visi tersebut diantaranya tentu mengacu pada data bahwa angka kemiskinan di Kota Pekalongan semakin menurun dalam 3 tahun terakhir, menurun hampir 2%. Pada tahun 2015 angka kemiskinan mencapai angka 8,0%, selanjutnya pada 2016 menjadi 7,92%. Data terakhir tahun 2017 angka kemiskinan 7,47%. Demikian data yang disampaikan oleh Sri Ruminingsih, Sekda Kota Pekalongan pada Tribun Jateng.<sup>3</sup> Jika diperbandingkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tertanggal 3 Nopember 2017 bahwa jumlah seluruh penduduk Kota Pekalongan adalah 299.222 jiwa, maka jumlah penduduk miskin adalah lebih dari 22.000 jiwa. Kemiskinan sudah menurun dalam catatan angka, tetapi bukan berarti kemiskinan sudah tidak ada. Hal itulah yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kota Pekalongan. Tidak sepatutnya sebuah kota yang terletak di simpul perniagaan ramai jalur Pantura memiliki penduduk miskin.

Sebagaimana yang diketahui bahwa kota Pekalongan terletak di kawasan pesisir Utara Pulau Jawa. Jalur ini adalah jalur strategis perniagaan, dan Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Bonus posisi geografis yang sedemikian itu menjadi sesuatu yang sangat berarti sebagai titik-tolak program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan untuk membebaskan diri dari adanya penduduk miskin.

Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada industri. Catatan tentang pertumbuhan industri di kota ini penuh dinamika. Pertumbuhan industri sejak tahun 2012 sampai 2016 mengalami fluktuasi yang

---

<sup>2</sup> Sa'diyah 2012

<sup>3</sup> Dikutip dari Laman: <http://jateng.tribunnews.com/>, diunduh tanggal 17 Nopember 2018.



cukup signifikan. Jika tahun 2012 pertumbuhan industri adalah 1,27%, tahun 2013 naik menjadi 30,52%. Namun pada tahun 2014 pertumbuhan industri turun menjadi 10,77% dan kembali naik signifikan pada tahun 2015 dengan pertumbuhan industri sebesar 44,65%. Tahun 2016 meskipun tetap tumbuh, namun pertumbuhan industri mengalami perlambatan menjadi 2,29%. Sektor industri tetap menjadi tumpuan perekonomian Kota Pekalongan selain perdagangan dan jasa.

Dua industri utama yang tumbuh subur di Kota Pekalongan adalah batik dan perikanan. Berbicara tentang industri batik, industri yang satu ini dan turunannya seperti ATBM, konfeksi, dan beberapa kerajinan berbasis batik, tidak bisa dipungkiri telah menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga Kota Pekalongan. Industri batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal.

Jika di era sekarang ini digalakkan ekonomi kreatif untuk menopang kesejahteraan masyarakat, di Kota Pekalongan hal ini sudah dilakukan sejak lama. Era digalakkannya ekonomi kreatif menjadi kekuatan bagi kota ini untuk semakin menguatkan langkahnya, menengok bahwa sekali pun hal itu sudah ada sejak lama tetapi karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu perlu digarisbawahi bahwa dari uraian yang sudah disampaikan di atas bahwa Kota Pekalongan sudah memiliki 'banyak aset' terkait dengan ekonomi kreatif. Aset-aset tersebut baik berupa kesejarahan Pekalongan yang sudah memiliki batik sebagai nadi perekonomian masyarakat selama ini, bonus posisi geografis dan kepedulian pemerintah daerah Kota Pekalongan yang memiliki visi "terwujudnya kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri dan berbudaya" dan diterbitkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017.

Mengacu pada tujuan pembangunan nasional yang pada intinya berujung pada kesejahteraan masyarakat, demikian juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan. Langkah yang dilakukan dalam rangka tujuan tersebut adalah dengan merencanakan program-program pembangunan. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah agar masyarakat berdaya atau memiliki

daya, kekuatan atau kemampuan. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat agar pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan tujuan untuk menuntaskan kemiskinan bisa tercapai. Jika semua aset penting sebagaimana sudah disebut sebelumnya sudah dimiliki Kota Pekalongan, bagaimana dengan kualitas keberdayaan masyarakatnya ? Percuma saja memiliki cita-cita untuk sejahtera, percuma saja memiliki banyak aset penting tetapi gagal dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjadi sumber daya masyarakat yang berkualitas.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang dapat digarispawahi sebagai rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan usaha kreatif sebagaimana pelaksanaan dari kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Meningkatkan Usaha Kreatif Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Usaha kreatif bisa dimaknai mempunyai kemampuan untuk mencipta, menghasilkan, dan mengembangkan sesuatu gagasan atau ide baru dan berbeda. Ada kesamaan pemaknaan antara usaha kreatif dengan pemaknaan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya<sup>4</sup>. Menurut Kasmir, kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha)<sup>5</sup>. Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut adalah bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang yang muncul di pasar. Eksploitasi tersebut sebagian besar berhubungan dengan pengarahan dan atau kombinasi input yang produktif. Ciri dan watak kewirausahaan antara lain adalah: (1) Percaya diri keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis, dan optimisme; (2) Berorientasi

---

<sup>4</sup> Drucker dalam Winardi 2003

<sup>5</sup> Kasmir 2007



pada tugas dan hasil; (3) Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba; (4) Ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras; (5) Mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif; (6) Pengambilan resiko kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan; (7) Kepemimpinan perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saransaran dan kritik; (8) Keorisinilan inovatif dan kreatif serta fleksibel; (9) Berorientasi ke masa depan pandangan ke depan.<sup>6</sup>

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>7</sup> Sumardjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: 1) Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan); 2) Mampu mengarahkan dirinya sendiri; 3) Memiliki kekuatan untuk berunding; 4) Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan 5) Bertanggungjawab atas tindakannya.<sup>8</sup>

Tujuan dan tahapan pemberdayaan masyarakat Jamasy mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan<sup>9</sup>. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri<sup>10</sup>. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi

---

<sup>6</sup> Suryana 2001

<sup>7</sup> Widjajanti 2011

<sup>8</sup> Sumardjo 1999

<sup>9</sup> Sumadji 2004

<sup>10</sup> Sulistiyani 2004

dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

### **c. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan**

Diambil dari tulisan Yulinda bahwa UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol<sup>12</sup>. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

*Pertama*, Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> *Pengertian Pemberdayaan Masyarakat*, Dikutip dari Laman: (<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>, diunduh 15/11/2018 )

<sup>12</sup> Yulinda 2017



*Ketiga*, Kesadaran Kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

*Keempat*, Partisipasi Keberdayaan. Dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

*Kelima*, Kontrol Keberdayaan. Dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

## **2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat diatur dalam kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan yaitu di dalam Peraturan Walikota Pekalongan No.13 Tahun 2017. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat menurut peraturan tersebut adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Termaktub dalam Bab II Pembentukan Kelompok Dasa Wisma Pasal 3 No.10 Peraturan Walikota Pekalongan No.13 Tahun 2017, bahwa maksud dibentuknya Kelompok Dasa Wisma (Pokdawis) adalah untuk mempercepat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 3 tersebut untuk menguatkan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No.10 tentang pembentukan Pokdawis yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) rumah tangga. Pada Pasal 1 No. 11

disebutkan bahwa Kota Pekalongan dalam rangka percepatan pembinaan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat guna peningkatan kesejahteraannya menerapkan Pokdawis Brayon Gotro (Kelompok Dasa Wisma Brayon Gotong Royong).

Pokdawis dalam hal ini yang lebih banyak berperan adalah ibu-ibu rumah tangga menengok bahwa program ini berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. Peran ibu-ibu rumah tangga dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Semakin meningkatnya pendapatan ibu rumah tangga maka semakin meningkat pula kesejahteraan, kualitas gizi dan kesehatan seluruh keluarga.<sup>13</sup>

### **3. Jenis Usaha Kreatif yang Sesuai untuk Diberdayakan di Pokdawis Kota Pekalongan**

Tidak dapat dipungkiri bahwa batik adalah nadi kehidupan perekonomian di Kota Pekalongan dari sejak dulu. Batik sudah menjadi karakter budaya masyarakat kota ini. Atas dasar itu maka usaha kreatif yang dapat dikembangkan dan diberdayakan di Pokdawis adalah seputar dunia batik. Tentang batik itu sendiri dapat berupa usaha batik tulis dan batik cap. Berbicara tentang usaha batik dan turunannya, ada satu hal yang istimewa sebagai salah satu perkembangan sempalan dari industri tersebut, yaitu kain jumputan. Jika dalam batik tulis membutuhkan ketrampilan lebih dalam mencanting dan membutuhkan waktu lama dalam penyelesaiannya, demikian juga dengan batik cap meski tidak serumit batik tulis tetapi tetap saja membutuhkan waktu relatif lama dalam penyelesaiannya. Berbeda halnya dengan kain jumputan. Membuat kain jumputan ini tidak memerlukan ketrampilan lebih baik dalam proses pembuatan motifnya maupun proses pewarnaannya. Pewarnaan yang digunakan adalah pewarna batik yang biasa digunakan dalam industri batik tulis dan batik cap. Proses pembuatan kain jumputan tidak memerlukan waktu lama, dalam sehari dapat menyelesaikan beberapa lembar kain. Ditinjau dari minat konsumen, akhir-akhir ini jumputan memiliki bargaining position yang baik seiring kebijakan yang disosialisasikan melalui Surat Edaran Penjabat Wali Kota Nomor 060/03798 bahwa PNS diwajibkan memakai pakaian tradisional. Adapun tujuan pemakaian busana adat ini untuk melestarikan budaya Nusantara.

---

<sup>13</sup> Mudzahar 2001



Sesungguhnya teknik jumputan bukanlah hal baru bagi masyarakat Pekalongan. Teknik jumputan di Pekalongan sudah banyak diterapkan dalam fashion, kebanyakan berupa gamis dan berbahan dasar katun untuk kaos. Berbeda dengan jumputan yang diproduksi oleh Solo dan Yogyakarta yang lebih banyak membuat jumputan berupa lembaran-lembaran kain dengan bahan dasar katun mori. Jumputan khas Pekalongan masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan variasi kekhasan motifnya yang spesifik dan variasi kain yang digunakan. Hal ini akan melengkapi kekayaan budaya kain jumputan di Indonesia yang lebih dahulu dimiliki oleh Solo, Yogyakarta, Palembang dan Bali.

Usaha kreatif yang bersentuhan langsung dengan ibu-ibu sebetulnya banyak jenisnya, usaha kreatif kain jumputan menjadi pilihan karena memberdayakan kemampuan masyarakat dengan suatu kegiatan yang sudah familiar sejak dulu (batik) itu lebih mudah daripada suatu kegiatan yang jauh dari akar budaya masyarakatnya. Selain itu juga karena peluang pasarnya yang menjanjikan. Dalam hal ini juga sesuai dengan salah satu misi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Pekalongan No. 25 Tahun 2017 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi keunggulan lokal daerah. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian.

#### **4. Strategi Pemberdayaan Pokdawis dalam Usaha Kreatif**

Untuk menjalankan program ini tidaklah mudah apabila Pokdawis beranggotakan orang-orang kreatifitasnya kurang atau memiliki kemampuan yang terbatas sehingga upaya pemberdayaan tidak optimal. Apabila persoalannya demikian maka untuk pengembangannya akan sangat diperlukan orang-orang yang kreatif di luar kelompok tersebut. Untuk memberdayakan kelompok tersebut perlu merangkul kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara mandiri. Keberadaan kelompok mandiri ini diharapkan untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan dalam bentuk keterampilan. Selain itu kegiatan pelatihan juga harus terjadwal dengan baik, misal per dua minggu sekali atau sebulan sekali, agar kelompok yang tidak kreatif terpacu menjadi kreatif dan mandiri.

## 5. Dukungan Pemerintah Daerah pada Keberlangsungan Pemberdayaan Pokdawis dalam Usaha Kreatif

Apabila kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha kreatif sudah dapat dilaksanakan dengan baik, selanjutnya Pokdawis sudah mampu berkiprah dalam industri kreatif, dibutuhkan keterlibatan pemerintah Kota Pekalongan, baik secara finansial melalui anggaran, maupun peran sebagai fasilitator dan kontributor pendukung harus lebih ditingkatkan. Dukungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya dapat melalui pembangunan pusat kreatif (creative center), pengembangan kawasan kreatif, pemberian penghargaan di bidang kreatif dan inovasi, dukungan riset dan pengembangan bagi produk lokal Kota Pekalongan yang memiliki kreasi unik, dan lain sebagainya.

### D. PENUTUP

Dari ulasan yang sudah disampaikan, kesimpulan pada umumnya adalah: Pemerintah Daerah Kota Pekalongan memberikan dukungan berupa kebijakan untuk mengembangkan usaha kreatif bagi masyarakat dan berperan sebagai fasilitator dan kontributor pendukung. Untuk itu usaha kreatif yang diberdayakan bagi masyarakat sebaiknya mengacu pada budaya lokal masyarakat yang sudah mengakar sehingga memperkecil terjadinya kegagalan. PKK dan Pokdawis yang merupakan unit terkecil dalam komunitas masyarakat memegang peran penting dalam mengembangkan usaha kreatif masyarakat. Dengan demikian Usaha kreatif dapat diberdayakan untuk masyarakat dan memberikan dampak keberdayaan ekonomi masyarakat apabila diprogramkan dengan baik oleh pemerintah dan selalu dalam monitoring dan evaluasi program hingga mereka benar-benar mandiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Yufi Halimah Sa'diyah, (2012). *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga melalui Faktor-faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNDIP.
- Kesi Widjajanti, (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 12 Nomor 1, Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Mudzahar, HM. Anto, dkk, (2001), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.



Peraturan Walikota Pekalongan No.13 Tahun 2017 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Dasa Wisma Di Kota Pekalongan

Peraturan Walikota Pekalongan No.25 Tahun 2017 tentang RKPD Kota Pekalongan 2018.

[http://eprints.umsida.ac.id/135/1/Puspita\\_383-393%20fix.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/135/1/Puspita_383-393%20fix.pdf)

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>,

Suryana, (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Yulinda Indah Pramesta, (2017). *Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Kerajinan Batik (Studi pada Kampong Batik Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan)*. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.